

PERANAN SEKTOR INFORMAL DALAM MASALAH URBANISASI DIPERKOTAAN (STUDI : PKL DI JALAN KALIMANTAN JEMBER)

Yuni hidayatun Nisa', Mustaqim

Mahasiswa FEBI IAIN Jember dan Dosen Fakultas Ushuludin IAIN Jember

Ayrenyuni10@gmail.com

Abstrak: *Penulisan karya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan sektor informal (Pedagang Kaki Lima/PKL) di jalan Kalimantan jember dan bagaimana peranan sektor informal dalam mengatasi masalah urbanisasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perkotaan. Pembangunan sosial diperkotaan menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji, karena kota secara structural dan cultural menjadi "centre place" yaitu tempat berkumpulnya berbagai masyarakat dengan berbagai kepentingan. Kota juga sebagai pusat distribusi barang dan jasa dapat memberikan harapan serta peluang untuk kesempatan kerja atau usaha. Situasi dan kondisi ini menyebabkan kota tidak pernah sepi dari pendatang. Urbanisasi dan pertumbuhan kota merupakan indikator dari modernisasi kemajuan. Akan tetapi, proses urbanisasi pada saat ini sering kali menimbulkan masalah sosial. Metode penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini, meliputi sumber data primer yang yang diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara sebagian subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, mengungkap kebenaran Keberadaan sektor informal jangan hanya dipandang sebagai hal negatif saja tetapi juga harus diperhatikan segi positifnya seperti mempunyai kemampuan untuk menyerap angkatan kerja hal ini mengingat keterbatasan sektor formal dalam menyerap angkatan kerja; dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.*

Kata kunci: *PKL, Jember, Urbanisasi*

A. Pendahuluan

Kota secara singkat bisa dipahami sebagai wilayah yang mempunyai fungsi sosial yang kompleks, terdiri dari berbagai suku bangsa, serta memiliki tingkat diferensiasi keterampilan dan spesialisasi pekerjaan yang beragam dalam



lingkungan masyarakat yang plural. Secara simbolik perkotaan identik dengan pesatnya kemajuan fisik, pembangunan mewah dan megah bernuansa modern, serta berbagai fasilitas yang memudahkan penghuninya. Wilayah perkotaan merupakan wilayah yang menjadi pusat terjadinya kemajuan pengembangan fisik pembangunan perekonomian, dan tampak jelas terjadinya kesenjangan sosial diantara penghuninya. Kondisi ini menunjukkan adanya pembangunan yang tidak menyeluruh dan belum adanya yang sistemik, holistik, dan inklusif bagi seluruh penghuni perkotaan.¹

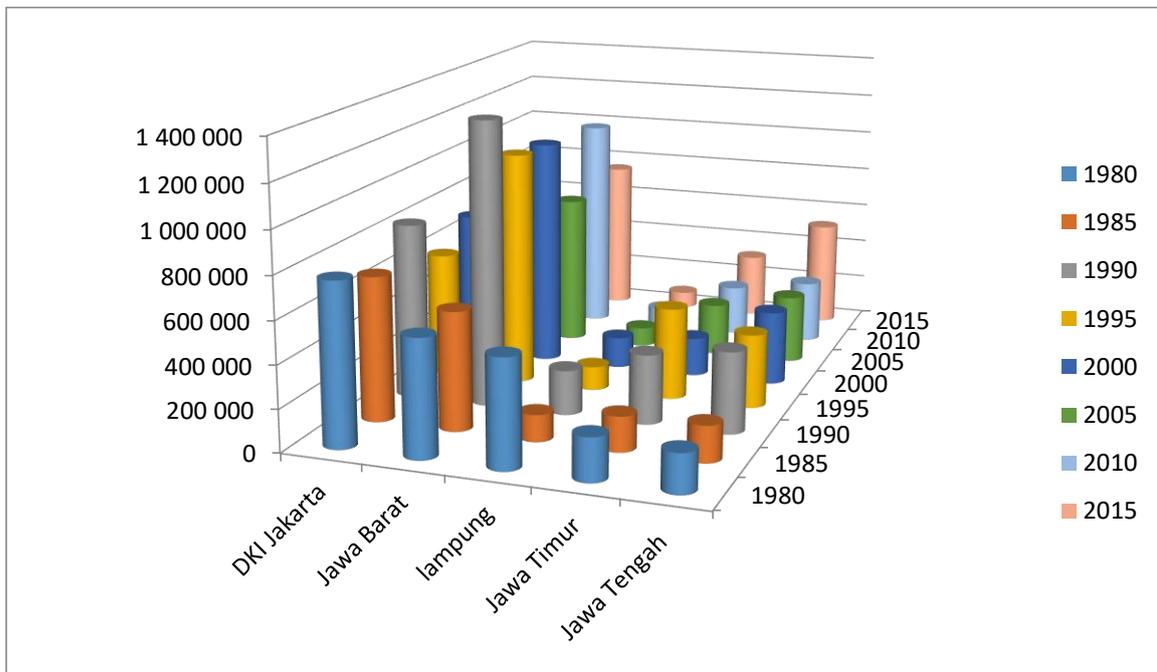
Konsekuensi logis dari berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh kota, membuat masyarakat desa berpindah ke kota, kegiatan ini selanjutnya disebut dengan migrasi. Sedangkan urbanisasi merupakan suatu proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Fenomena perpindahan penduduk secara besar-besaran ke kota menjadi dilema yang sangat kompleks dalam proses pembangunan. Kaitan positif antara urbanisasi dengan pendapatan perkapita adalah semakin maju suatu negara, yang diukur dengan pendapatan per kapita, semakin banyak pula jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Fenomena urbanisasi ini bisa terjadi di semua negara meskipun pada laju yang berbeda.

Indonesia sebagai negara bagian ketiga juga tidak lepas dari fenomena ini, seperti halnya yang dialami negara-negara yang sedang berkembang pada masa ini, juga Indonesia mengalami arus perpindahan penduduk dari desa ke kotayang cukup tinggi, walau secara prosentual belum setinggi tingkat urbanisasi di negara industri. Tetapi berbeda dengan di negara industri, arus urbanisasi di Indonesia tidak di imbangi dengan adanya perluasan kesempatan kerja dikota-kota baik di sektor industri maupun di sektor jasa atau kesempatan untuk membuka usaha sendiri. Akibat dari ketimpangan ini, maka arus urbanisasi ini walaupun prosentual tidak terlalu tinggi telah menimbulkan masalah pengangguran dan akibat negatif lainnya. Pendatang baru menjadi beban tambahan bagi kota-kota yang mereka datangi. Karena kesulitan tempat tinggal dan ketiadaan uang, pendatang baru yang kebanyakan berbekal pendidikan rendah tinggal digubuk-gubuk, di emperan took, dan kolom jembatan. Sebagian dari pendatang baru menumpang atau berdesak-desakan dengan sanak atau teman sekampung yang lebih dulu sampai di kota. Ada pula masalah dalam bidang-bidang: kebersihan kota, ekologi, pendidikan, transportasi, dan kriminalitas. Semakin tinggi arus urbanisasi yang tidak

¹ Cucu Nurhayati, *Pengembangan Sosial sektor informal perkotaan: studi atas pedagang kaki lima di pasar minggu DKI Jakarta* (Jakarta : Orbit Publishing Jakarta, 2015), 1.

seimbang dengan daya tampung kota maka proplem sosial makin bertambah pula.

Menurut beberapa ahli seperti: Masri Singarimbun, May Ling Oey, urbanisasi di Indonesia harus di tanggapi secara wajar, karena masalahnya tidak akan selesai dengan hanya mengutuk para pendatang, tetapi bersangkut-paut dengan masalah ekonomi dan sosial secara nasional.



Grafik jumlah migrasi yang masuk

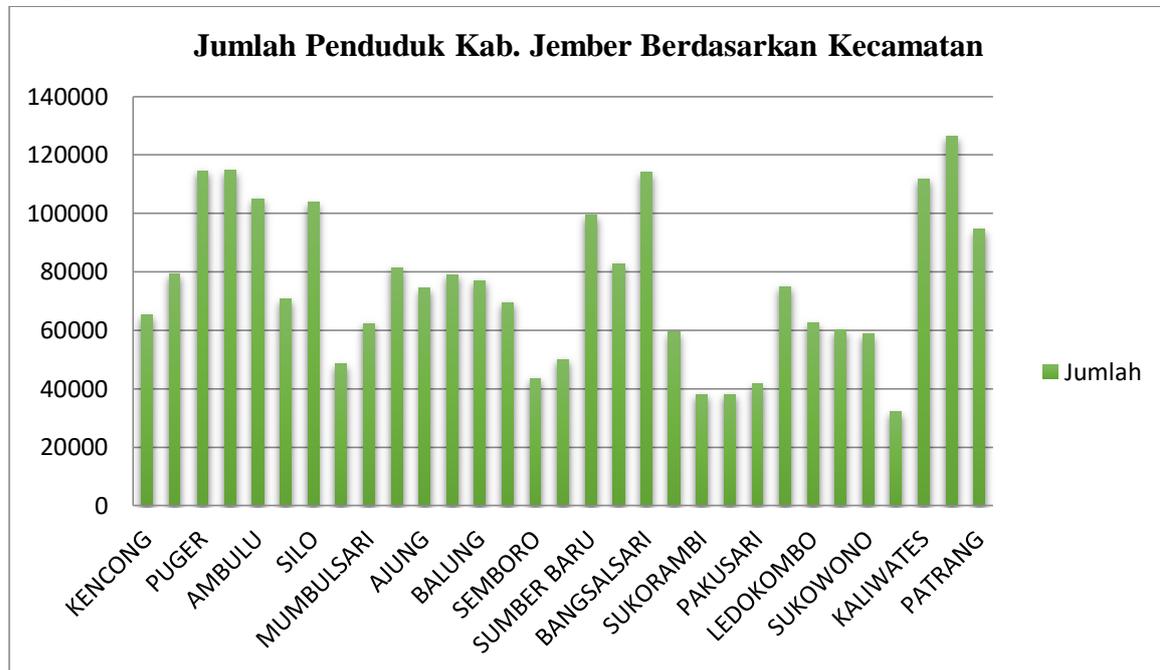
Sumber : BPS Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000, 2010 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1985, 1995, 2005, 2015

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah migrasi masuk. yang menempati posisi pertama DKI Jakarta pada sebesar 766363 sedangkan untuk tahun 2015 sebesar 499101 artinya mengalami penurunan, dalam hal ini pergerakan jumlah migrasi yang masuk menagalami naik turun setiap tahunnya. Sedangkan jumlah migrasi yang masuk untuk provinsi jawa timur sebesar 315543 pada tahun 2015, jika dilihat dari grafik jumlah migrasi masuk ke Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun pada tahun 1985 sempat mengalami penurunan.

Jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu terus bertambah karena arus urbanisasi penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan meningkat dengan cepat, karena daerah perkotaan mempunyai daya tarik yang sangat kuat.



Alasan yang utama adalah kota sebagai sebagai pusat fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, kebudayaan. Kota juga mempunyai fungsi pemasaran bagi wilayah sekitarnya, serta menjadi pusat pengembangan industri pengolahan.



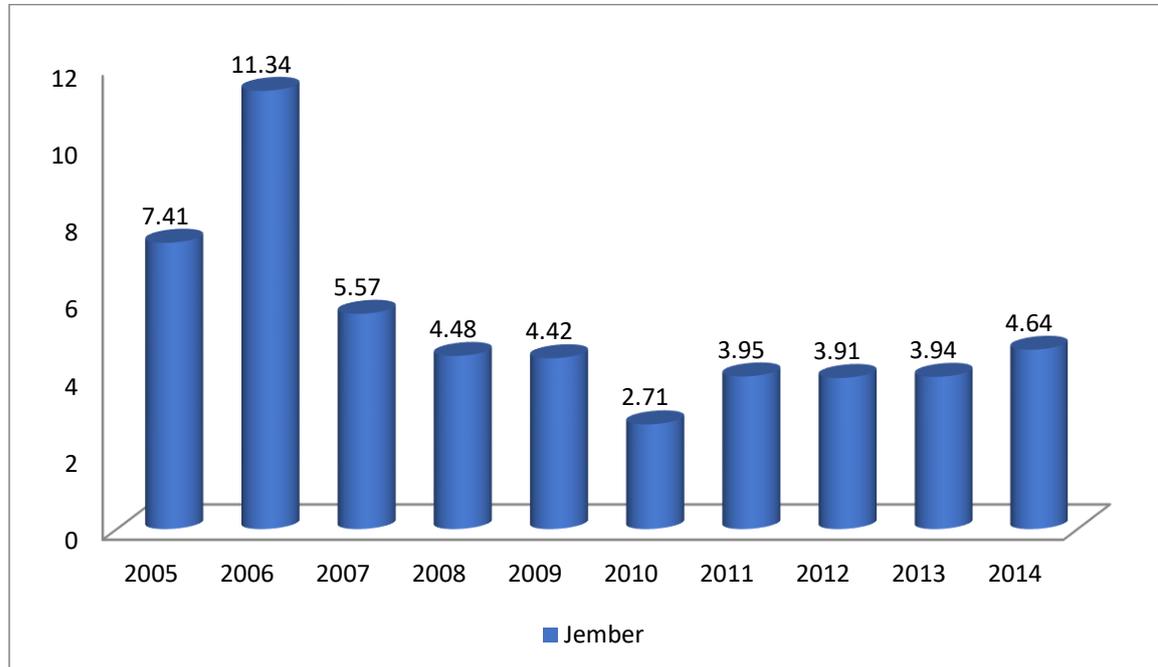
Dalam kasus ini, berdasarkan data Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Departemen dalam Negeri, Kabupaten Jember menduduki peringkat ke-3 daerah yang memiliki jumlah kaum urban terbanyak di Indonesia. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Jember, Arief Tjahjono mengakui jika penduduk yang keluar maupun datang ke kabupaten Jember jumlahnya cukup tinggi. Besarnya jumlah urbanisasi itu, membuat Dispenduk capil Kabupaten Jember dalam satu hari memberikan pelayanan kependudukan seperti KTP, KK dan akta kelahiran melebihi target yang ditentukan.²

Pada grafik di atas, populasi penduduk terbanyak adalah kecamatan Summersari sebanyak 126279 orang. Hal ini disebabkan, Kecamatan Summersari merupakan tempat yang paling strategis dimana terdapat beberapa kampus yang ada di Kecamatan tersebut bukan hanya itu tempatnya juga dekat dengan alun-alun kota. Namun banyaknya penduduk di kawasan tersebut tentu juga membutuhkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, karena jika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang cukup maka pengangguran akan meningkat. Seperti pada data di bawah ini, tingkat pengangguran terbuka pada

² <https://www.radiobintangtenggara.com/2017/07/12/arief-tjahjono-jumlah-kaum-urban-di-jember-tempati-peringkat-ke-3-terbanyak/> (di akses pada 13 October 2018)



tahun 2014 mengalami kenaikan lagi padahal pada tahun 2010 sudah menurun mencapai 2,71 persen kemudian terus meningkat sampai pada tahun 2014 sebesar 4,64 persen. Hal ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tersedia masih kurang, khususnya lapangan pekerjaan disektor formal sehingga tidak menutup kemungkinan bagi para pekerja untuk mencari kerja di sektor informal.



Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Jember (dalam persen)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas 2005–2014

Pokok permasalahannya adalah berkaitan dengan kedudukan kota sebagai suatu unit kesatuan. Beberapa pokok masalahnya adalah pertumbuhan penduduk yang cepat, migrasi dari desa ke kota, pertumbuhan lapangan kerja yang harus disediakan, kebutuhan akan lahan pemukiman, kebutuhan tata ruang untuk kegiatan-kegiatan usaha, kebutuhan akan layanan sosial dan prasarana fisik, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan sosial diperkotaan menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji, karena kota secara structural dan cultural menjadi “*centre place*” yaitu tempat berkumpulnya berbagai masyarakat dengan berbagai kepentingan. Kota juga sebagai pusat distribusi barang dan jasa dapat memberikan harapan serta peluang untuk kesempatan kerja atau usaha. Situasi dan kondisi ini menyebabkan kota tidak pernah sepi dari pendatang. Menurut Lerner, urbanisasi dan pertumbuhan kota merupakan indikator dari modernisasi kemajuan. Akan tetapi, proses urbanisasi pada saat ini sering kali menimbulkan masalah sosial.

Permasalahan di kota di antaranya adalah tingginya angka pengangguran, munculnya perkampungan kumuh, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan tumbuhnya perekonomian sektor informal. Tidak berbandingnya rasio pekerjaan di sektor formal menimbulkan mengalirnya pekerjaan ke sektor informal. Bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian dan hanya memiliki sedikit modal memilih sektor informal sebagai alternatif pekerjaan yang dijalaninya.³

Sektor ekonomi informal di perkotaan mempunyai peran cukup penting bagi masyarakat miskin kota yang memiliki keterbatasan modal dan keterampilan. Sektor informal menjadi alternatif pilihan pekerjaan baik penduduk lokal maupun para pendatang yang bermigrasi ke perkotaan sebagai strategi untuk mempertahankan hidup di perkotaan.

Dari uraian di atas jika dikaitkan dengan pendapat Todaro dalam buku *economic development* mengatakan “ *generally, the more developed the country measured by capita income, the greater the share of population living in urban areas.*”⁴ Maksudnya Semakin maju suatu kota maka semakin banyak penduduk yang berpindah ke tempat tersebut. Dalam hal ini banyaknya penduduk yang berpindah ke Jember tentunya harus ada lapangan pekerjaan yang tersedia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, lapangan pekerjaan yang tersedia masih minim hal ini ditunjukkan oleh jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2017 sebesar 4,77 persen dan tingkat partisipasi kerja sebesar 68,68 persen dari total penduduk jember.

B. Kajian Teori

1) Urbanisasi

Urbanisasi adalah peningkatan bertahap proporsi orang yang tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan menurut Wirth, urbanisme adalah cara hidup yang khusus di kota yang diukur dengan skala penduduk, kepadatan penduduk, keheterogenan dan urbanisasi yang dianggap sebagai proses urbanisme ini bertambah dan meluas. Dalam hal ini urbanisasi dapat berperan sebagai data statistik dalam perubahan masyarakat. pandangan yang menjadikan urbanisasi sebagai dependent variabel kini dapat dilihat dari teori Agnew. Dia menganggap urbanisasi sebagai proses masyarakat

³ Ibid., 2.

⁴ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development 11 edition* (United Kingdom : Arrangement with Person Education Limited, 2006), 311.

yang memberi perubahan pokok dalam cara kehidupannya, sistem tempat tinggal dan struktur ekonomi daerah.⁵

Menurut beberapa ahli seperti: Masri Singarimbun, May Ling Oey, urbanisasi di Indonesia harus di tanggapi secara wajar, karena masalahnya tidak akan selesai dengan hanya mengutuk para pendatang, tetapi bersangkut-paut dengan masalah ekonomi dan sosial secara nasional.

1. Faktor penyebab urbanisasi.

Proses perpindahan orang desa ke kota merupakan masalah yang kompleks dan persoalannya harus didekati dari berbagai sudut, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, sosiologi, dan juga dari sudut religi serta keamanan jiwa dan harta. Namun dalam garis besarnya dalam banyak uraian disebutkan 2 faktor utama yaitu: a) faktor penarik (*pull factor*), b) faktor pendorong (*push factors*).⁶

a. Faktor penarik

Orang desa tertarik ke kota adalah sesuatu yang lumrah yang sebab-sebabnya bagi individu atau kelompok mungkin berbeda satu sama lain dilihat dari kepentingan individu tadi. Beberapa alasan yang menarik mereka pindah ke kota antara lain:

- 1) Melanjutkan sekolah, karena di desa tidak ada lagi sambungannya atau mutu sekolah di desa dianggap kurang baik
- 2) Terpengaruh oleh ceritera dari mereka yang kembali kedesa bahwa hidup di kota gampang dan cari pekerjaan atau membuka usaha kecil-kecilan sangat mudah
- 3) Tingkat upah dikota lebih tinggi
- 4) Keamanan dikota lebih terjamin
- 5) Hiburan lebih banyak
- 6) Kebebasan pribadi lebih luas
- 7) Adat atau agama lebih longgar
- 8) Dan banyak sebab lainnya yang dari individu ke individu bisa sangat berbeda-beda.

b. Faktor pendorong

Kalau kota di satu pihak mempunyai daya tarik tersendiri maka di lain pihak keadaan tingkat hidup di desa Indonesia umumnya mempercepat proses perpindahan ke kota. Berikut warna kemiskinan yang seakan-akan abadi. Perubahan zaman dan perubahan politik di

⁵ Shogo Koyano, *Pengkajian Tentang Urbanisasi di Asia Tenggara* (Yogyakarta : Academica Press Inc, 1996), 3-4.

⁶ B.N Mabrun, *Kota Indonesia Masa Depan : Masalah dan Prospek* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1994), 60.



Indonesia, baik ketika zaman colonial belanda, maupun zaman pendudukan jepng dan zaman kemerdekaan, nasib desa tidak banyak berubah. Desa tetap seakan-akan hanya tempat pemasok berbagai kebutuhan orang kota. Hampir 70% kegiatan utama ekonomi Indonesiaberada dikota dan volume uang yang beredar dijakarta saja mencakup 65-70% dari keseluruhan. Sehingga tidak mengherankan di desa cukup banyak faktor yang mendorong mereka bermigrasi ke kota.

Beberapa faktor pokok sebab migrasi adalah sebagai berikut:

1) Proses kemiskinan di desa

Di desa-desa Indonesia, terutama di Jawa sebagai akibat dari pertambahan penduduk yang cepat telah menyebabkan perbandingan antara jumlah penduduk dan luas lahan pertanian menjadi sangat timpang. Lebih dari 30% penduduk desa di jawa hidup sebagai buruh tani dan tidak mempunyai lahan pertanian sendiri. 35% dari sisa penduduk jawa mempunyai luas tanah pertanian kurang dari 1 ha, yang berarti secara teoritis tidak mungkin untuk menghidupi satu keluarga. Karena persediaan tanah telah habis dan bahkan dengan adanya pembangunan besar-besaran selama pelita, terpaksa juga memakai areal pertanian yang sudah sempit tersebut, untuk pembangunan pabrik baru, jalan, perumahan, perkantoran, sekolah dan lain-lainnya. Bagi banyak penduduk desa berlama-lama tinggal didesa berarti menunggu mati.

2) lapangan kerja yang hamper tidak ada

orang desa terkenal ulet, sabar dan juga kerja keras. Namun karena jumlah kelahiran yang cukup tinggi dan jumlah lapangan kerja di desa cenderung menurun, mengakibatkan pengangguran nyata dan tidak nyata. Lapangan kerja lain di luar tani hampir tidak tersedia atau tidak berkembang.

3) pendapatan yang rendah

kedua faktor pendorong di atas merupakan lingkaran setan yang otomatis berakibat pendapatan per kapita atau per keluarga di desa menjadi rendah. Tingkat upah memburuh di desa sangat rendah di bandingkan dengan upah minimum yang berlaku dikota-

kota. Hal itu mendorong mereka mengadu nasib ke kota dengan harapan dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

4) *Keamanan*

Bagi beberapa golongan tertentu hidup di desa atau di daerah pedalaman kurang aman bagi jiwa dan hartanya. Keadaan ini terutama timbul bila terjadi pergolakan politik atau pertentangan keluarga

5) *adat istiadat yang ketat*

bagi mereka yang telah mendapat pendidikan yang agak lumayan sering merasa bahwa adat istiadat di kampung, di samping faktor kemelaratan, begitu kaku dan ini mendorong mereka untuk mencari sedikit kebebasan di kota.

6) *melanjutkan pendidikan*

memang hampir di tiap desa Indonesia sudah ada SD. Dan di beberapa tempat SMP atau sekolah kejuruan lainnya. Tetapi kalau mereka ingin sekolah lebih lanjut terpaksa harus pergi ke kota. Terkadang di desa tetangga mungkin ada SMA atau sekolah kejuruan lainnya, tetapi mereka sering memilih di kota dengan alasan mutu di desa tidak begitu baik, dan setelah tamat sekolah tidak mudah masuk perguruan tinggi, atau mendapat pekerjaan karena orang kota meremehkan tamatan SMA desa. "Pendidikan" ini pada gilirannya akan membuat mereka menjadi "asing" di desanya sendiri.

2. Dampak Urbanisasi

Pertambahan penduduk kota secara mendadak sudah pasti akan menimbulkan masalah. Tetapi kota yang statis dan jumlah pertambahan penduduk kota yang tidak mampu mengisi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang deras arusnya. Juga akan kurang menguntungkan perkembangan dan pertumbuhan kota itu sendiri. Memang ini suatu paradoks. Beberapa ahli yang memandang urbanisasi dari dua segi yaitu:⁷

a. Segi positif

Pandangan atau tanggapan yang positif terhadap urbanisasi terutama berkembang dikalangan pemerintah dan perencana pada tingkat nasional yang melihat urbanisasi sebagai hal yang tidak dapat di elakkan dalam pembangunan. Pandangan ini didukung oleh fakta

⁷ Ibid., 69.



sejarah bahwa hampir tidak ada Negara yang dapat mencapai kemajuan ekonomi tanpa proses urbanisasi. Pengikut paham ini melihat urbanisasi sebagai usaha pembangunan yang menyeluruh, tidak terbatas dalam pagar administrasi kota.

Pertimbangan lain atas pandangan positif terhadap urbanisasi ialah bahwa kota di pandang sebagai “agen modernisasidan perubahan” (*agent for modernization and change*). Mereka melihat kota sebagai tempat pemusatan modal, keahlian, daya kreasi dan segala macam fasilitas yang mutlak diperlukan bagi pembangunan. Kota dan dinamika tidak hanya diperlukan atau menjadi syarat bagi proses industrialisasi, tetapi Negara–negara agraris juga memerlukan kota, baik sebagai kota pelabuhan maupun sebagai terminal pemasokan barang kebutuhan pertanian.

Alasan lain yang agak emosional ialah: bahwa kita tidak mungkin membayangkan bagaimana pertumbuhan dan keadaan Jakarta sekarang ini dan juga pusat–pusat industri di dunia lainnya bisa tercapai kalau seandainya tidak ada urbanisasi.

Rupanya pandangan positif atau urbanisasi ini menjadi inspirasi bagi pertemuan para ahli dan pejabat tinggi pemerintah di konferensi pertumbuhan Urban (*Pacific Conference on Urban Growth*) mei 1967 di Hawaii. Pertemuan tersebut telah mengeluarkan satu “*statement*” yang tersembunyi.

- 1) Masalah–masalah pembangunan desa, masyarakat kecil dan kota–kota besar sangat berat hubungannya dengan yang lain sehingga program pembangunan nasional harus memerhatikan kesatuan.
- 2) Masalahnya bukan lagi untuk memutuskan bagaimana kita harus membagi sumber–sumber antara kota dan desa, tetapi bagaimana kita dapat menggunakan sumber–sumber nasional yang terbatas untuk mengembangkan keduanya bersama–sama.
- 3) Bagi masyarakat desa maupun kota, masalah yang terpenting adalah bagaimana menggunakan cara paling efektif untuk melaksanakan modernisasi. Ini dapat mencakup cara–cara pendekatan baru seperti peningkatan produktivitas pekerja di daerah pedesaan dengan memanfaatkan usaha–usaha pendidikan melalui mass media yang di sebarbrkan dari kota–kota, atau pendirian pabrik pupuk dan usaha “processing” bahan makanan

serta usaha-usaha lain yang dapat meningkatkan standar hidup di daerah pedesaan. (J. P Hendropranoto Suselo, "*tanggapan dan sikap terhadap masalah urbanisasi.*" Prisma, oktober 1972, hal. 30)

b. Segi negatif

Beberapa akibat nyata dari arus urbanisasi yang tidak terkendali ialah:

1) Masalah perumahan atau tempat tinggal

Hampir tidak ada kota di Indonesia, juga di luar negeri, yang dapat membangun atau menyediakan fasilitas perumahan yang wajar bagi pertumbuhan penduduk kota yang alamiah (2–3% per tahun); apalagi bagi penghuni penduduk kota yang datang mendadak. Kebanyakan di antara kaum migrant tersebut tergolong kelas orang miskin dan berpendidikan rendah, sehingga hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menyewa tempat tinggal, karena harga sewa rumah di kota rata-rata melangit. Membangun rumah juga tidak mungkin. Harga tanah juga selalu membumbung tinggi. Akibatnya, para migrant terpaksa membuat gubuk-gubuk liar atau berdiam di emperan toko dan di kolong jembatan.

2) Masalah pedagang kaki lima

Masalah pedagang kaki lima dan cara-cara berjualan yang tidak permanen lainnya, membuat pusing petugas pemerintah kota.

3) Masalah gelandangan

4) Masalah penggangguran

5) Masalah transportasi: antara lain masalah becak

6) Masalah ekologi.

2) Sektor informal

Istilah sektor informal mulai muncul pada tahun 1870-an, diterapkan pada berbagai macam mata pencaharian, bersekala kecil non pertanian di negara sedang berkembang. Pelaku sektor informal ini biasanya dalam menggunakan alat-alat yang sangat sederhana dan bahan mentahnya sekedarnya. Secara sederhana sektor informal dipahami sebagai bentuk usaha yang tidak termasuk pada sektor formal.

Konsep sektor informal pertama kali dikemukakan oleh Keith Hart. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut, Hart membagi kriteria kesempatan memperoleh penghasilan di kota dalam tiga kelompok, yaitu formal, informal sah dan informal tidak sah. Perbedaan sektor formal dan informal dapat



dilihat dari keteraturan cara kerja, hubungan dengan perusahaan, curahan waktu dan status hukum yang dilakukan.⁸

Sektor informal juga dapat didefinisikan mereka yang berstatus usaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, dibantu oleh keluarga atau tidak dibayar dan mempunyai modal yang relative sedikit. Sektor informal terdiri dari unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa yang tujuan pokoknya adalah menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri. Sektor ini pada umumnya, berpendidikan rendah, modal rendah dan terjadinya mobilitas vertikal.

Mazumdar mengatakan bahwa sektor informal sebagai “unprotected sector dan sektor formal sebagai sektor yang terproyeksi. Dalam hal ini dia, menolak bahwa kemiskinan tidak menjadi ciri utama sektor ini.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hidayat, yang mendefinisikan sektor informal sebagai “*unprotected sector*” dalam hal ini proteksi yang dimaksud berasal dari pemerintah. Maksudnya, sektor informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi secara resmi dari pemerintah. Seperti dalam hal pengusahanya berupa tarif dan non tarif terhadap saingan luar negeri, penyediaan sarana produksi dengan murah dan syarat pinjaman yang lunak dan lain sebagainya. Sedang proteksi dari pekerjanya berupa standar upah minimal, jaminan kondisi kerja perlindungan dan sebagainya.

Meskipun berskala kecil, sektor informal memiliki keunggulan, yaitu merupakan sektor ekonomi yang dinilai tahan terhadap resesi dan dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional (Rusmel Jb, 2088; Kasali, 2010). Di negara berkembang seperti Indonesia, sektor informal memang lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor formal. Dikemukakan oleh Kasali (2010), pada tahun 2010 sekitar 90,8 juta penduduk Indonesia bekerja pada sektor informal. Jumlah tersebut sekitar 50.7 juta jenis usaha informal yang umumnya merupakan usaha kaki lima dalam berbagai bidang makanan hingga tekstil. Menurut Kasali, kondisi ini menunjukkan kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada sektor informal yang umumnya berbentuk wirausaha.⁹

Sektor informal pada kenyataannya mampu menjadi penopang ketidakmampuan negara menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Pada saat ini, sektor informal mampu menyerap tenaga kerja

⁸ Cucu Nurhayati, *Pengembangan Sosial sektor informal perkotaan: studi atas pedagang kaki lima di pasar minggu DKI Jakarta* (Jakarta : Orbit Publishing Jakarta, 2015), 24.

⁹ Suradi, “Peranan Sektor Informal Dalam Penanggulangan Kemiskinan” (Informasi, Vol. 16 No. 03 Tahun 2011)

dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi, dan mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran di Indonesia yang cenderung meningkat setiap tahun. Pakar ekonomi Didik J. Rachbini (2010) menegaskan, bahwa sektor informal mengisi seluruh sudut perekonomian nasional, dari sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa lainnya. Sektor informal mengisi setidaknya dua pertiga dari perekonomian nasional. Struktur ini merupakan bagian strategis di dalam sistem, tetapi sekaligus merupakan masalah yang rumit. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sektor informal memiliki berbagai peranan yang sangat penting, yaitu¹⁰ :

1. Menopang ketidakmampuan negara menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya.
2. Mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi, dan mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran.
3. Mengisi seluruh sudut perekonomian nasional, dari sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa lainnya.

Jenis sektor informal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima. Dipilihnya pedagang kaki lima karena usaha ini paling mudah dimasuki dan menjadi alternatif paling mudah bagi tenaga kerja dalam menciptakan lapangan sendiri. Selain itu PKL merupakan jenis usaha sektor informal yang relative tidak menetap dan mempunyai peralatan usaha yang dipeindahakan.

C. Pembahasan dan Analisa

1. Gambaran Objek Dampungan

Kabupaten Jember adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang beribukota di Jember. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudera Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di barat. Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan.¹¹

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas suku Jawa dan suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember#Geografi (di akses pada tanggal 13 October 2018)

terdapat minoritas Suku Osing. Juga warga Tionghoa yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember. Jember berpenduduk 2.529.967 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km².¹²

Kecamatan terbanyak penduduknya adalah Sumpalsari, berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Jember jumlah penduduk mencapai 126.279 jiwa pada tahun 2010. Di kecamatan ini juga terdapat tiga kampus yaitu Universitas Negeri Jember, Universitas Muhammadiyah Jember dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan, sehingga banyak warga pendatang di kecamatan tersebut khususnya kalangan mahasiswa dalam rangka menimba ilmu.

Berdasarkan alasan tersebut peneliti tempat penelitian di jalan Kalimantan, Sumpalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Serta alasan lain yang mendukung adalah karena di jalan Kalimantan banyak para pekerja sektor informal khususnya pedagang kaki lima.

2. Pertumbuhan Sektor Informal di jalan Kalimantan Jember

Pertumbuhan sektor informal di jalan Kalimantan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Awalnya mulanya jalan Kalimantan masih sepi dan berupa hutan, serta sedikit sekali pemukiman warga. Namun setelah di bangun Universitas Negeri Jember banyak para pendatang yang tinggal di Jember. Begitu pula dengan pertumbuhan sektor informal yang awal mulanya hanya sedikit kini jumlahnya sangat banyak. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber Pak Sumar yang sudah menekuni pekerjaan selama kurang lebih 40 tahunan.

“sudah dari dulu waktu saya masih bujang, sebelum kerja ini saya dulu sebagai pekerja becak kemudian ayah saya sakit, kemudian ayah saya

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember (di akses pada tanggal 13 October 2018)

membelikan mesin untuk buka bengkel ini. Dulu Unej ini sebelum di bangun masih berbentuk hutan, kemudian hanya terdiri dari beberapa rumah saja. Kemudian tahun 70-an kalau tidak salah unej baru dibangun. Kemudian tambah banyak dan ramai sekali sampai sekarang ini. Dulu yang buka bengkel masih sedikit sekarang sudah banyak'

Selain itu perkebangan sektor informal khususnya jumlah PKL semakin banyak. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pedagang kaki lima di jalan Kalimantan misal jumlah pedagang es degan di dekat budaran DPR Jember dalam satu barisan terdapat lima penjual yang menjual minuman sejenis, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor informal khususnya PKL semakin meningkat. Sebagaimana pernyataan dari narasumber pak Luk penjual es degang ketika ditanya tentang perkembangan sektor informal di jalan Kalimantan.

" saya sudah 10 tahun kerja jadi PKL, dulu yang berjualan disini masih masih sedikit, sekarang sudah banyak. Di deretan ini saja yang menjual es degan ada 5 orang belum di daerah yang lain. Tapi namanya usaha kalau tidak ada pesaing justru tidak sehat. Ada pesaing tidak apa-apa yang penting bersaing secara sehat. Saya tidak khawatir dengan rejeki karena sudah ada yang ngatur. Buktinya saya bisa membiayai 10 cucu saya"

Pertumbuhan sektor informal juga tidak lepas dari banyaknya kaum urban yang ada di Jember. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tujuh narasumber tiga dari mereka merupakan kaum pendatang di luar kota Jember. Salah satunya berasal dari Surabaya, Tasikmalaya, dan Garut. Ketika ditanya terkait alasan mereka bekerja sebagai PKL karena pendidikan mereka yang masih rendah yaitu tamat SMP dan mereka sadar kalau perusahaan menerima karyawan minimal lulus SMA.

3. Peranan Sektor Informal dalam Mengatasi Masalah Urbanisasi Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perkotaan.

Keberadaan sektor informal jangan hanya dipandang hanya sebagai hal negatif saja tetapi juga harus diperhatikan segi positifnya. Dari segi positifnya sektor informal mempunyai dampak sebagai berikut : (i) mempunyai kemampuan untuk menyerap angkatan kerja. Hal ini mengingat keterbatasan sektor formal dalam menyerap angkatan kerja; dan (ii) mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Sektor informal yang selama ini bagi sebagian orang dianggap lebih sering sebagai beban yang mencemari keindahan dan ketertiban kota, justru

perlu dilindungi, dibangun, dikembangkan atau dibina sehingga dampak negatifnya bisa dihilangkan karena sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa bantuan pemerintah. Sektor ini telah member andil dan ikut berperan dalam menjawab proses pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Berikut adalah pernyataan narasumber bapak Hartono terkait peranan sektor informal dalam mengangkat ekonomi masyarakat khususnya para pedagang kaki lima.

“ awalnya saya bekerja sebagai salesman di salah satu produk minuman, karena dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan selalu dikejar target. Setelah itu saya bekerja di salah satu penjual terang bulan, waktu berjalan saya berhenti dan membuka usaha sendiri dan bisa memproduksi sebanyak 5 kg / hari. Penghasilan yang saya peroleh dari dagangan ini sudah cukup bahkan lebih sekarang saya mempunyai 2 orang karyawan dan saya berencana membuka cabang baru.”

Peranan sektor informal justru memainkan peran penting khususnya di daerah perkotaan seperti di Jember yang notabenenya menjadi kota dengan kaum urban ketiga di Indonesia. Sektor informal alternatif bagi para pekerja yang tidak bekerja disektor formal. Baik itu karena minimnya pendidikan ataupun lapangan pekerjaan disektor formal masih belum mencukupi dari banyaknya tenaga kerja. Berikut pernyataan dari narasumber ibu Ajai ketika ditanya alasannya memilih bekerja sebagai pedagang kaki lima.

“ lulus dari SMP saya langsung merantau dan bekerja sebagai PKL, mau bekerja di perusahaan tidak mungkin diterima, karena minimal harus lulusan SMA. Jadi saya memili jadi PKL saja, selain penghasilannya lumayan dan juga kalau bekerja tidak diatur orang bebas mau bekerja dari jam berapapun beda kalau kita bekerja ke orang harus mengikuti aturan yang ada.”

Sektor informl terus memainkan peran yang penting di negara berkembang meskipun selama bertahun-tahun diabaikan atau justru dumsuhi. Di banyak negara berkembang, sekitar setengah dari penduduk perkotaan bekerja disektor informal. Sektor informal ditandai oleh beberapa karakteristik unik seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karyawan), dan teknologi yang dipakai relatif sederhana.

Daftar Pustaka

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Economic Development 11 edition*. United Kingdom : Arrangement with Person Education Limited.

Waluyo, Setyo Atdi “Study Urbanisasi di Wilayah Perkotaan kabupaten Tegal: Karakteristik dan Tantangan Berdasarkan Sudut Pandang Pemerintah kabupaten” (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2005)

Immanuel S, Abet Nego “ Analisis pendapatan dan Angkatan kerja terhadap Urbanisasi dikota Bengkulu” (Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014.

Koyano, Shogo. 1996. *Pengkajian Tentang Urbanisasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta : Academica Press Inc

Mabrun, B.N. 1994. *Kota Indonesia Masa Depan : Masalah dan Prospek* Jakarta : Penerbit Erlangga.

Nurhayati, Cucu. 2015. *Pengembangan Sosial sektor informal perkotaan: studi atas pedagang kaki lima di pasar minggu DKI Jakarta*. Jakarta : Orbit Publishing Jakarta.

Suradi, “Peranan Sektor Informal Dalam Penanggulangan Kemiskinan” (Informasi, Vol. 16 No. 03 Tahun 2011)

Referensi internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember#Geografi (di akses pada tanggal 13 October 2018)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember (di akses pada tanggal 13 October 2018)

<https://www.radiobintangtenggara.com/2017/07/12/arief-tjahjono-jumlah-kaum-urban-di-jember-tempati-peringkat-ke-3-terbanyak/> (di akses pada 13 October 2018)

